

II. TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

2.1.1 Tinjauan Tentang Persepsi

A. Pengertian Persepsi

Dilihat dari segi umumnya persepsi adalah pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek yang telah diamati. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Davidoff dalam Bimo Walgito (2010:89) bahwa yaitu :

Persepsi merupakan aktivitas yang *intergrated* dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain.

Menurut Bimo Walgito dalam Sunaryo (2004:93) ”persepsi adalah proses perorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu”.

Menurut Miftah Thoha (2007:141) menyatakan bahwa:

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan,

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu tatanan yang benar terhadap situasi.

David Matsumoto (2008:59) menjelaskan Pengertian Persepsi:

Persepsi adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut. Persepsi biasanya dimengerti sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut diseleksi, ditata, dan ditafsirkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu cara pandangan seseorang yang berbeda terhadap objek yang dilihat dan dirasakannya berdasarkan pada pengamatan, pengetahuan, dan pengalaman yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, dan tidak menutupi kemungkinan jika dalam satu objek orang satu dengan orang yang lain berargumen berbeda.

Proses persepsi yang rumit ini tergantung pada sistem sensorik otak. Sistem sensorik kita akan mendeteksi informasi, mengubah kedalam impuls saraf, mengolah diantaranya, dan mengirimkan ke otak melalui benang-benang saraf. Otak memainkan peranan yang sangat luar biasa dalam mengolah data sensorik. Karena itu dikatakan bahwa persepsi tergantung pada empat cara kerja, yaitu pengenalan (*deteksi*), pengubahan energi dari suatu bentuk ke

bentuk lainnya (*transduksi*), penelusuran (*transmisi*), dan pengolahan informasi.

B. Syarat-Syarat Persepsi

Setiap orang yang akan melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat. Seperti yang dikatakan Sarlito Wirawan Sarwono (2009:90), seseorang individu bisa dikatakan mengadakan persepsi terhadap suatu objek apabila memenuhinya beberapa syarat sebagai berikut :

- 1) Perhatian
Biasanya seseorang tidak akan menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada suatu atau dua objek. Perbedaan fokus akan menyebabkan perbedaan persepsi
- 2) Set
Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seseorang pelari akan melakukan start terhadap set akan terdengar bunyi pistol, dan disaat itu ia harus mulai berlari.
- 3) Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) Sistem Nilai
Sistem yang berlaku pada suatu masyarakat, juga berpengaruh pada persepsi.
- 5) Ciri Kepribadian
Misalnya A dan B bekerja disebuah kantor, si A seorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan si b yang penuh percaya diri menganggap atasannya sebagai orang yang bisa diajak bergaul seperti orang yang lain.
- 6) Gangguan kejiwaan
Hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya syarat-syarat yang mempengaruhi persepsi seseorang, persepsi seseorang sangat ditentukan dari kepribadian, keadaan jiwa, dan harapan dalam

melakukan persepsi. Persepsi yang positif mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang sedangkan persepsi negatif mengakibatkan motivasi seseorang berkurang atau tidak baik.

C. Faktor-Faktor Persepsi

David Krech dan Richard. S dalam Djalaludin Rahmat (2009:59) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :

1) Faktor fungsional

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu, faktor ini terdiri atas :

- a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental.
- c. Suasana emosi seperti pada saat senang, sedih, gelisah, marah akan mempengaruhi persepsi
- d. Latar belakang budaya

2) Faktor Struktural

Faktor ini berasal dari sifat stimulasi fisik dan sistem syaraf individu, yang meliputi :

- a. Kemampuan berfikir
- b. Daya tangkap duniawi
- c. Saluran daya tangkap yang ada pada manusia

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka penulis dapat simpulkan pada umumnya persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cara belajar, latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman masa lalu dan latar belakang dimana orang tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yang

bermacam-macam seperti setuju, netral, tidak setuju terhadap suatu objek yang diteliti.

2.1.2 Tinjauan Tentang Masyarakat

A. Pengertian Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan disekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dan sebagainya. Manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Pengertian masyarakat menurut MacIver dan Page dalam Soejono Soekanto (2009:22) “masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia”. Sedangkan pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007:30) dijelaskan bahwa:

Kata masyarakat berasal dari kata *musyarak* (Arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Auguste Comte dalam Abdulsyani, (2007:31) mengatakan bahwa: “masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk

hidup dengan realitas-realiatas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”.

Dapat penulis simpulkan dari pengertian di atas bahwa pengertian masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dan adanya hubungan kontak sosial antara satu sama lain yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikan dan perasaaan persatuan yang sama.

B. Ciri-Ciri dan Syarat Masyarakat

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerjasama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota-anggota. faktor waktu memang peran penting, sebab setelah hidup dengan cukup lama, maka terjadi proses adaptasi terhadap organisasi tingkah laku serta kesadaran berkelompok.

Ciri-ciri masyarakat telah nampak selaras dengan definisi masyarakat sebagaimana telah dikemukakan oleh J.L. Gilian dan J.P. Gillin. Dalam Abdulsyaini (2007:32) ”Bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai

kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil” sedangkan menurut Soejono Soekanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdulsyani (2007:32) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu
- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Dapat penulis simpulkan dari ciri-ciri dan syarat masyarakat di atas, masyarakat bukan hanya sekumpulan manusia belaka, akan tetapi di antara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lain. Paling tidak setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya.

2.1.3 Pengertian Persepsi Masyarakat

Adapun pengertian masyarakat menurut Ralp Linton dalam buku Soerjono Soekanto (2009:22) mengatakan bahwa “masyarakat adalah

setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap dari mereka sebagai suatu ketentuan sosial dengan batasan-batasan yang telah dirumuskan dengan jelas”.

Menurut Selo Semardjan dalam buku Soerjono Soekanto (2009:22), menyatakan bahwa “masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Sedangkan menurut Irwanto (1996:71) menyatakan “persepsi adalah “proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antara gejala maupun peristiwa) sampai disadari dan dimengerti”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu objek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun objeknya sama.

2.1.4 Tinjauan Tentang Konflik

A. Pengertian Konflik

Konflik disebut juga pertikaian atau pertentangan. Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif. Hal ini berarti satu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Dengan kata lain, pertikaian

merupakan usaha penghapusan keberadaan pihak lain. Pengertian ini senada dengan pendapat Soedjono Soekanto (2009:96) “konflik adalah suatu bentuk proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan” .

Menurut Fisher dkk dalam Taufik Abdullah (2006:243)” konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran yang tidak sejalan”, sedangkan Menurut Minnery dalam Vina Dwi Laning (2009:37), mendefinisikan “konflik sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut”.

Konflik merupakan salah satu bentuk faktor penyebab perbuahan sosial di suatu individu atau kelompok masyarakat dalam poses interaksi sosial yang dapat berdampak baik jika konflik dikelola dengan baik dan dapat pula berdampak tidak baik apa bila dikelola dengan tidak baik.

Dapat penulis simpulkan bahwa konflik berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekadar untuk mempertahankan

hidup dan eksistensi. Konflik juga bertujuan sampai tahap pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

B. Macam-Macam Bentuk Konflik

Macam-macam konflik sosial sebagaimana diungkapkan di depan, bahwa munculnya konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keragaman. Soerjono Soekanto (2009:94) berusaha mengklasifikasikan bentuk dan jenis-jenis konflik tersebut.

Menurutnya, konflik mempunyai beberapa bentuk khusus, yaitu:

1. **Konflik Pribadi**
Konflik yang terjadi antara diri seseorang dengan orang lain yang disebabkan oleh perasaan tidak suka, benci yang mendalam, dan dendam pribadi yang mendorong orang tersebut untuk menghina, memaki, dan memusnahkan pihak lawan.
2. **Konflik Rasial**
Konflik rasial terjadi antara ras. Konflik ini umumnya terjadi di suatu negara yang memiliki keragaman suku dan ras. Secara umum ras di dunia dikelompokkan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras-ras khusus.
3. **Konflik Antara Kelas-Kelas Sosial**
Konflik ini terjadi antar kelas-kelas atau pun status sosial di masyarakat yang disebabkan karena adanya sesuatu yang dihargai, seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Kesemua itu menjadi dasar penempatan seseorang dalam kelas-kelas sosial.
4. **Konflik Politik Antar Golongan dalam Satu Masyarakat.**
Konflik politik terjadi karena setiap golongan di masyarakat melakukan politik yang berbeda-beda pada saat menghadapi suatu masalah yang sama. Karena perbedaan inilah, maka peluang terjadinya konflik antar golongan terbuka lebar.
5. **Konflik Internasional**
Konflik internasional biasanya terjadi karena perbedaan-perbedaan kepentingan di mana menyangkut kedaulatan negara yang saling berkonflik. Pada umumnya konflik berlangsung dalam lima tahap, yaitu tahap potensial, konflik terasakan, pertentangan, konflik terbuka, dan akibat konflik.

Menurut Kumar Rupesinghe and Marcial Rubio C (1994:19-20)

menjelaskan jenis-jenis konflik internal yaitu (terjemahan):

1. Konflik idiologi antara negara dan gerakan pembrontakan, di mana terdapat kesenjangan sosial antara kelas dominan.
2. Konflik pemerintahan dan penguasa meliputi pembagian kekuasaan dan wewenang di dalam masyarakat. Tuntutan dari oposisi adalah perubahan rezim dan partisipasi rakyat.
3. Konflik rasial, sangat jelas di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan di tempat lain
4. Konflik identitas, di mana aspek yang dominan adalah perbedaan etnis, agama, suku, atau linguistik. Seringkali konflik melibatkan pencampuran identitas dan pencarian keamanan. Dalam kasus belakangan ini, Konflik utama sering menyangkut peralihan kekuasaan dan konflik tersebut cenderung meningkat. Konflik identitas dapat dibagi lagi menjadi konflik teritorial, konflik etnis dan minoritas, pernyataan agama, dan pembrontakan yang muncul dari diri sendiri.
5. Konflik antar negara bagian, yang biasanya kasus perang tradisonal antar negara bagian.

Berbagai hubungan boleh terjadi di antara konflik yang sangat jelas atau kita dapat menemukan campuran dari beberapa. Klasifikasi di atas berbentuk statis. Apa yang dikemukakan ialah untuk mengkonsepkan keterkaitan berbagai konflik tersebut. Tipologi adalah cara pengelompokan contoh-contoh konflik sehingga ciri-ciri umum dan perbedaan sistematis yang terlihat. Akan tetapi ini hanya sebuah tujuan pernyataan. Kesamaan dan perbedaan adalah bagunan dari sebuah budaya. Tipologi berasal dari teori. tipologi adalah alat pengelompokan konflik dan bukan sebuah kebenaran.

Konflik identitas adalah konflik yang paling meresap dan konflik kekerasan yang terbesar dari konflik yang lainnya. Identitas diartikan sebagai sebuah kekekalan perasaan diri, yang intinya

membuat hidup dapat diprediksi oleh individu. Untuk dapat memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konflik dapat dipelajari dari pengalaman tentang konflik. Identitas adalah mengandung arti sebagai lebih dari rasa psikologis diri, melainkan mencakup rasa yang satu aman di dunia fisik, psikologis, sosial, bahkan spiritual.

Etnis adalah bagian dari identitas. Etnis bukan konsep yang tetap tetapi berubah-ubah dalam batas-batas etnis dan etnis dapat terus menerus didefinisikan ulang, karena merupakan faktor-faktor yang pasti.

Dapat penulis simpulkan dari penjelasan di atas bahwa konflik dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun antar negara dan konflik semata-mata tidak terjadi begitu saja melainkan melalui tahap-tahap interaksi sosial.

C. Latar Belakang Budaya

Menurut Soerjono Soekanto (2009:150) “kata budaya berasal dari bahasa sangsekerta *buddhayah* yang merupakan betuk jamak kata *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal” sedangkan E.B. Tylor dalam Soerjono Soekanto (2009:150) pernah memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya): “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat”.

Menurut Sole Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soerjono Soekanto (2009:151) “merumuskan kebudayaan dalam sebuah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat”. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kebudayaan adalah sebuah hasil karya, rasa dan cipta masyarakat yang dibuat oleh masyarakat melalui pengetahuan, kepercayaan dan sebagainya dengan menggunakan akal dan budi masyarakat tersebut.

1) Latar Belakang Budaya Jawa

Menurut Suseno (2001:11) “orang Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa yang berbahasa Jawa” sedangkan menurut Koentjaraningrat, (1994:3) “orang Jawa berasal dari pulau Jawa yang merupakan salah satu kepulauan Indonesia, kurang lebih panjang 1.200 kilometer dan lebar rata-rata 500 kilometer bila diukur dari ujung-ujungnya yang terjauh dan sekitar tujuh derajat disebelah garis katulistiwa” sedangkan

Daerah kebudayaan Jawa berasal dari masyarakat yang tinggal atau mendiami bagian tengah dan timur dari seluruh pulau Jawa sedangkan baratnya (yang hampir seluruhnya merupakan dataran tinggi Pariangan) merupakan daerah Sunda yang merupakan suku bangsa sendiri.

Menurut Koentjaraningrat, (1994:24) “Wilayah kebudayaan Jawa dibagi menjadi wilayah kebudayaan penduduk pesisir utara dan wilayah kebudayaan ujung timur serta wilayah kebudayaan penduduk pedalaman”. Wilayah kebudayaan penduduk pesisir utara berhubungan dengan perdagangan, pekerjaan nelayan dan pengaruh Islam lebih kuat, sehingga menghasilkan kebudayaan Jawa yang khas yaitu kebudayaan pesisir. Daerah Jawa pedalaman sering disebut *kejawen*, mempunyai pusat budaya dalam kota kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Dua daerah ini dianggap sebagai daerah sumber dari nilai dan norma Jawa. Latar belakang keraton yang dihuni kalangan priyayi merupakan pembawaan kebudayaan dan tradisi Jawa. Dalam kalangan keraton cita-cita estetis dan religius Hindu masih hidup diantara mereka.

Menurut Kodiran dalam Koentjaraningrat (2004:337) “Masyarakat Jawa mengenal sistem kekerabatan berdasarkan prinsip keturunan bilateral”. Sistem kekerabatan masyarakat Jawa menunjukkan sistem klasifikasi menurut angkatan-

angkatan yang berarti memperhitungkan keanggotaan kelompok kekerabatan melalui garis laki-laki dan perempuan

Menurut Kodiran dan Koentjaraningrat (2004:329) mengatakan: “Masyarakat Jawa, dalam pergaulan hidup maupun perhubungan sosial sehari-hari menggunakan bahasa Jawa”. Penggunaan bahasa daerah ini, harus memperhatikan dan membedakan keadaan orang yang diajak bicara atau yang sedang dibicarakan, berdasarkan usia atau status sosialnya.

Menurut kodiran dalam Koentjaraningrat, (2004:345) menyatakan:

Masyarakat Jawa, masih membedakan antara golongan *priyayi* yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar dengan golongan kebanyakan yang disebut *wong cilik*, seperti petani, tukang-tukang, dan pekerja keras lainnya, disamping keluarga keraton dan keturunan bangsawan atau *bendara-bendara* dan masyarakat Jawa mengenal kriteria pembagian masyarakat berdasarkan kriteria pemeluk agama, golongan *santri* dan golongan penganut agama *kejawen*.

Masyarakat Jawa dalam kehidupan sosial sehari-hari menyadari kedudukannya dalam jenjang-jenjang hierarkis, menyadari peran masing-masing dan menjalani kehidupannya sesuai dengan status untuk menjaga keselarasan hidup dalam dunia.

Berdasarkan dari pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat Jawa adalah orang yang mendiami daerah

pulau Jawa bagian tengah dan timur. Masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa yang berbeda pada saat penggunaanya dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Jawa masih membedakan antara golongan *priyayi* dengan golongan bawah dan sistem kekerabatannya masyarakat Jawa menggunakan sistem berdasarkan prinsip keturunan bilateral.

2) Latar Belakang Budaya Lampung

Kebudayaan orang Lampung menurut Ali Imron (2005:17) terdiri dari dua golongan, yaitu “*ulun* Lampung yang beradat Pepadun dan *ulun* Lampung yang beradat Saibatin”. Mereka yang dimaksud *ulun* Lampung asli adalah *ulun* Lampung yang berasal dari keturunan *Sekala Berek* yang berbudaya dan berbahasa Lampung. Populasi masyarakat Lampung menurut Hadikusuma dalam Ali Imron (2005:18), “adalah hanya berjumlah satu juta jiwa dan telah menjadi minoritas dibandingkan dengan asal pendatang atau transmigrasi”. *Ulu*n Lampung Pepadun bertempat tinggal cukup jauh dari pantai terdiri dari Abung Sewo Mego, Megopak Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku, sedangkan *Ulu*n Lampung Saibatin bertempat tinggal di pesisir pantai yaitu Melinting atau Meringgai, Kota Agung, Kalianda, Belalau, dan Krui.

Menurut Ali Imron (2005:18) mengatakan:

Kehidupan masyarakat Lampung sehari-hari berpedoman kepada prinsip *pill pesenggiri*”. Konsep *pill* artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan sedangkan *pesenggiri* pada dasarnya mengutamakan harga diri. Jadi dapat diartikan *pill pesenggiri* adalah harga diri.

Adapun prinsip harga diri dalam *Pill pesenggiri* Menurut Ali

Imron (2005:18) adalah:

- 1) *Pesegir*
Pesegir adalah sikap dan perilaku pantang menyerah dan perbuatan yang dapat menjaga atau menegakkan nama baik martabat secara perorangan maupun kelompok kerabat agar tetap dipertahankan, apa saja termasuk nyawanya demi kepentingan pesenggiri tersebut.
- 2) *Juluk buadek*
Juluk buadek Bersalah dari kata juluk dan buadek. Juluk artinya nama panggilan kesayangan di masa kecil yang diberikan oleh sang kakek kepada cucunya, sedangkan buadek adalah gelar yang diberikan setelah seseorang berkeluarga dan diresmikan dalam upacara adat.
- 3) *Nemui nyimah*
Nemui nyimah adalah ramah-tamah, suka menerima tamu, dan berbaik hati, sopan santun dengan semua pihak, baik terhadap orang luar klen, maupun dengan siapa saja yang berhubungan dengan mereka.
- 4) *Negah nyepur*
Negah nyepur adalah ikut terlibat dalam kegiatan di masyarakat, terutama dengan orang yang sejajar kedudukan adat atau dengan orang yang lebih tinggi.
- 5) *Negah nyepur*
Negah nyepur adalah orang Lampung yang suka tolong-menolong, gotong-royong, bahu-membahu, dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan bagi orang lain

Kelas-kelas sosial berdasarkan kekuasaan, hak istimewa, dan prestise dalam masyarakat Lampung menurut Tim IDKD dalam Ali Imron (2005:20) menganut pada:

1) Perinsip Umur

Perinsip ini nampak dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pelaksanaan upacara adat. Kelompok orang tua biasanya berperan sebagai pemikir, perencana, penasihat, dan pengambilan keputusan. Kelompok yang masih muda seperti kepala-kepala keluarga yang masih muda menjadi pendamping dan membantu kelompok yang lebih tua. Kemudian menyusul kelompok *menghanai* atau bujang yang bertugas sebagai tenaga kerja atau teknis semua peralatan yang digunakan oleh adat.

2) Perinsip *Kepunyimbangan*

Kepunyimbangan dalam arti kependudukan seseorang sebagai pemuka ada disamping urutan kependudukannya sebagai anak laki-laki tertua menurut garis hierarki keturunan masing-masing.

3) Perinsip Keaslian

Perinsip ini menunjukkan perbedaan antara masyarakat Lampung yang tergolong *buway asal* atau keturunan pendiri kampung asal. Golongan ini merupakan golongan bangsawan yang mempunyai hak utama turun-menurun dari leluhur asal. Kelompok asal ditandai oleh adanya hak memiliki atas barang-barang pusaka dan tanah kerabat.

Dapat penulis simpulkan dari beberapa pendapat di atas, bahwa masyarakat Lampung terdiri dari masyarakat Lampung Saibatin dan Masyarakat Lampung Pepadung. Masyarakat Lampung bertempat tinggal cukup jauh dari pantai sedangkan masyarakat saibatin bertempat tinggal di pesisir pantai. Masyarakat Lampung dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perinsip *pill pesenggiri*.

D. Teori Konflik

Kehidupan masyarakat pasti terjadi suatu konflik. hal ini senada dengan pandangan pendekatan teori konflik dalam Nasikun (2005:16) berpangkal pada anggapan dasar sebagai berikut:

- 1) Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak ada akhirnya
- 2) Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, atau dengan perkataan lain, konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
- 3) Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
- 4) Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah kelompok atau orang-orang lain.

E. Tingkatan Konflik

Menurut Lois R Pondy dalam Anas Urbaningrum (1999:14) konflik memiliki tahap-tahap yang memiliki 5 tingkatan antara lain :

- 1) Konflik laten (*laten Conflict*) ditandai dengan 3 hal :
 - a. Adanya persaingan untuk merebutkan sumber daya terbatas.
 - b. Memperebutkan kendati kekuasaan terkadang seseorang memandang itu untuk mengontrol atau mencegah diri atau kelompok untuk dikontrol oleh orang lain.
 - c. Adanya perbedaan tujuan pada sub unit-unit organisasi atau kelompok.
- 2) Konflik mulai terasa (*persive conflict*)
Hal ini terjadi takkala masing-masing pihak secara sadar terlibat dalam konflik. hal tersebut tidak dalam hal sebelumnya.
- 3) Konflik semakin terasa (*felt conflict*)
Hal ini terjadi takkala ia memperoleh tanggung Jawab emosional (*emotional respon*) dari pihak yang terlibat suatu konflik.
- 4) Konflik terbuka
Konflik ini timbul dikarenakan tidak teratasinya konflik pada tingkat ke tiga, dimana konflik ini dicirikan perang mulut sampau dengan kekerasan fisik.
- 5) Konflik akhir (sementara) dari sebuah konflik. sebab bagaimanapun juga kemungkinan untuk terjadinya konflik kembali terjadi kembali bila penyelesaian konflik tidak memuaskan dari kedua pihak yang berkonflik.

Sedangkan menurut Nasukin dalam (2005:63), konflik memiliki dua tingkatan penting dari konflik yang memungkinkan terjadi, yaitu

- a. Konflik dalam tingkatan yang bersifat idiologis.
- b. Konflik yang bersifat politis.

Konflik dalam tingkatan idiologis wujudnya ada dalam bentuk sistem-sistem nilai yang dianut, sedangkan dalam tingkatan politis konflik terjadi dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas keberadaannya dalam masyarakat.

Kedua konteks ini, konflik bukan semata-mata menunjukkan pada bentuk yang terang-terangan, tetapi juga menyentuh bentuk-bentuk halus. Sehingga dalam upaya-upaya penyelesaian suatu konflik yang melibatkan suatu benda ataupun perasaan harus diusahakan untuk diselesaikan. Mungkin bila tidak diselesaikan akan muncul konflik baru yang lebih kompleks sifatnya. Untuk melaksanakan hal ini dituntut selalu mengedepankan rasa keadilan bukan kepentingan individu, kepentingan serta golongan. Apabila tidak mengedepankan rasa keadilan hal ini tidak menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi bahkan akan memperuncing konflik yang akhirnya merugikan kedua pihak yang berkonflik.

F. Kriminalitas Remaja

Kejahatan atau kriminalitas bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan,

direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Abdul Wahid (2004: 125) mengatakan “Kriminalitas menurut bahasa Inggris *Crime* dan dalam bahasa Belanda *Misdadaad* berarti kelakuan atau perilaku kriminal, atau perbuatan kriminal”. Kejahatan adalah bentuk tunggkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Definisi kriminalitas atau kejahatan menurut Kartono (2003 : 126) bahwa :

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)

Pengertian kejahatan sebagai unsur dalam pengertian kriminalitas, secara sosiologis mempunyai dua unsur-unsur yaitu:

1. Kejahatan itu ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis.
2. Melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan.

Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Kriminalitas remaja brawal dari kenakalan remaja semakin hari semakin meresahkan masyarakat yang semakin tidak terkendali. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang dari aturan atau melanggar hukum sehingga mengganggu ketertiban dan ketenangan hidup di masyarakat. Seringkali kenakalan remaja yang diawali dengan perbuatan iseng baik di keluarga maupun di masyarakat, menyebabkan tindakan kriminalitas misalnya: mencuri, tawuran menggunakan senjata tajam.

Menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati (2007:23) Kenakalan remaja pada umumnya ditandai oleh dua ciri-ciri berikut:

1. Adanya keinginan untuk melawan, seperti dalam bentuk radikalisme.
2. Adanya sikap apatis yang biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap kondisi masyarakat.

Menurut Didik Hermawan dalam Nurul Comaria (2008:98) kenakalan remaja dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain: penyalahgunaan obat, nonton vcd porno, dan lain-lain.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya melawan statusnya sebagai pelajar dengan cara membolos sekolah, melawan statusnya sebagai anak dengan cara kabur dari rumah, dan lain-lain

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa kriminalitas remaja merupakan suatu tindakan dari kenakalan remaja yang berlebihan yang disebabkan oleh tindakan untuk melawan dan sikap apatis terhadap masyarakat yang mengakibatkan remaja dapat bertindak seperti mencuri, berkelahi, dan bahkan membunuh orang.

G. Penyebab dari Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial yang dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker dalam Vina Dwi Laning (2009:34) Sebab-musabab dari suatu konflik antara lain sebagai berikut :

- a. Perbedaan antara Individu-individu
Pada dasarnya setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan ini mampu menimbulkan konflik sosial. Perbedaan pendirian dan perasaan setiap orang dirasa sebagai pemicu utama dalam konflik sosial.
- b. Perbedaan Kebudayaan
Kebudayaan yang melekat pada seseorang mampu memunculkan konflik manakala kebudayaan-kebudayaan tersebut berbenturan dengan kebudayaan lain. Seseorang secara sadar atau tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kebudayaan.
- c. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok sumber dari sebuah konflik wujud kepentingan bermacam-macam, ada kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

d. Perbedaan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini mengakibatkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

H. Akibat-akibat dari Konflik

Menurut Soejono Soekanto dalam Vina Dwi Laning (2009:36)

yaitu :

- a. Bertambahnya solidaritas *in-group* antar Anggota Kelompok yang berkonflik.
- b. Berubahnya kepribadian individu
- c. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa.
- d. Dominasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.
- e. Retaknya hubungan antara pihak yang bertikai.

Dapat penulis simpulkan dari pendapat diatas bahwa akibat dari konflik tidak hanya berdampak negatif saja, akan tetapi konflik juga dapat mengakibatkan dampak positif. Dampak dari konflik tersebut dapat dikelola sesuai dengan pengelolaan konfliknya

I. Pengelolaan Konflik

Dilihat dari akibat konflik dalam M. Hardjana, Agus. (1994:44), “jelas bahwa konflik susah atau tidak dapat dipecahkan begitu saja karena entah bagaimanapun pemecahaannya, dampaknya akan tetap berlangsung kearah positif maupun kearah negatif”. Terhadap konflik yang sudah terjadi, sebaiknya orang tidak memecahkan konflik melainkan memanfaatkannya dan mengelola konflik.

1) Tujuan Pengelolaan Konflik

Menurut M. Hardjana, Agus. (1994:45) bahwa “Tujuan dari pengelolaan konflik secara negatif merupakan tujuan minimal dan seangkan tujuan pengelolaan konflik secara positif merupakan tujuan maksimal”.

Dari pendapat di atas dapat penulis dijelaskan Tujuan pengelolaan konflik dapat dilihat secara positif maupun negatif. Secara positif tujuan pengelolaan konflik adalah untuk memanfaatkan konflik itu demi perbaikan orang-orang atau kelompok yang terlibat terjadi sebuah konflik sedangkan secara negatif tujuan dari pengelolaan konflik adalah agar konflik yang terjadi tidak mengganggu orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik.

2) Cara Pengelolaan Konflik

Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Menurut M. Hardjana, Agus. (1994:46) cara pengelolaan konflik diantaranya:

- a. Bersaing, Bertanding (*Competiting*), Menguasai (*Dominating*), atau Memaksa (*Forcing*).
Dengan cara ini satu pihak memperjuangkan kepentingannya dengan pengorbankan pribadi dan kepentingan pihak yang lain. Tujuannya mendapatkan apa yang diperjuangkan dan mengalahkan pihak lawan.
- b. Menghindari (*Avoiding*) atau Menarik Diri (*With Drawall*).
Dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingannya masing-masing bahkan mereka tidak menaruh perhatian pada perkara yang dikonflikkan.

- c. Kompromi (*Compromising*) atau Berunding (*Negotiating*). Dalam cara pendekatan ini pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling memberi kelonggaran dan konses dan mendapatkan yang yang diinginkannya tetapi tidak penuh ataupun kehilangan tetapi tidak seluruhnya.
- d. Kerjasama (*Collaborating*) atau Menghadapi (*Confronting*). Dengan cara pengelolaan konflik ini, kedua pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kedua pihak. Tujuannya adalah masing-masing mendapatkan yang diinginkan .
- e. Menyesuaikan (*Accommodating*), Memperlunak (*Smoothing*), atau Menurut (*Obliging*). Dalam pendekatan ini, satu pihak terlibat dalam konflik melepaskan dan mengesampingkan hal yang diinginkan, dan memenuhi keinginan pihak lain.

Dapat penulis simpulkan dari penjelasan di atas pengelolaan konflik terdiri dari menyesuaikan masalah konflik, menghindari, kompromi, dan bersaing. Dengan cara pengelolaan konflik, konflik dapat yang berdampak positif maupun berdampak negatif tergantung cara pengelolaan konflik.

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Konflik

Konflik yang terjadi dapat mendatangkan banyak kerugian tetapi dapat juga membawa banyak manfaat bagi orang. Hal ini sangat ditentukan oleh cara pengolaannya. Menurut M. Hardjana, Agus. (1994:49) pengolaannya sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Hubungan antara orang-orang yang ada dalam konflik
- b. Watak orang yang terlibat, dan keseimbangan kekuasaan antara mereka
- c. Resiko yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat bila bertemu untuk mengelola konflik yang mereka alami
- d. Hakikat konflik

- e. Masalah yang menjadi inti dan pentingnya masalah
- f. Modus dan cara pengelolaannya
- g. Perkiraan berhasil-tidaknya pengelolaan konflik

Dari penjesan diatas, dapat penulis jelaskan bahwa pengelolaan konflik dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan masalah konflik, watak pihak yang berkonflik, dan resiko yang dihadapi.

2.1.5 Tinjauan Tetang Penyebab Konflik Antara Desa Kesumadadi Dengan Desa Buyut Udik

Pada dasarnya, munculnya konflik tidak bisa lepas dari kehidupan suatu masyarakat, karena konflik adalah merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu interaksi sosial. Konflik hanya dapat dikendalikan dan diminimalisasi saja, sehingga konflik yang timbul tidak sampai stadium lanjut yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konflik antara Desa Kesumadadi dan Desa Buyut Udik disebabkan oleh kesalah pahaman antara dua desa. Kedua desa berangapan masing-masing desa paling benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Peyebab konflik antara Desa kesumadadi dengan Desa Buyut Udik terdapat beberapa latar belakang diantarnya:

A. SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)

Menurut Rahmat Arifin dikutip di: (<http://blog.uad.ac.id/arifrahman/2011/12/05/konflik-sara/>) SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Dalam pengertian lain SARA dapat di sebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan yang lain.

Menurut Rahmat Arifin dikutip di: (<http://blog.uad.ac.id/arifrahman/2011/12/05/konflik-sara/>) SARA dapat digolongkan dalam tiga katagori

1. Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
2. Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
3. Kategori ketiga yaitu Kultural : merupakan penyebaran mitos tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Dalam masalah SARA ada beberapa hal yang perlu dicermati adalah :

- a. Pertama, hubungan antara suku pribumi dan nonpribumi sampai saat ini belum dapat dipecahkan, dan tetap menjadi pemicu potensial timbulnya konflik sosial.
- b. Kedua, SARA muncul kembali sebagai faktor pendorong timbulnya "nasionalisme daerah" berupa upaya memisahkan suatu wilayah dari wilayah Republik Indonesia, meskipun masalah ini secara historis seharusnya sudah selesai ketika bangsa ini memproklamasikan Sumpah Pemuda 1928.
- c. Ketiga, ada gejala bergesernya sebab pemicu: timbulnya gejolak sosial dari masalah SARA ke masalah yang bersifat struktural.
- d. Keempat, seimbang antara suku dalam akses mereka pada sumber alam.
- e. Kelima, pada tingkat makro lain seperti belum terciptanya birokrasi yang secara politis netral.

1. Suku

Pengertian suku bangsa secara sederhana adalah kelompok tertentu yang memiliki kesamaan latar belakang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian suku bangsa, atau kelompok etnik merupakan perkumpulan orang yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, kebiasaan, gaya hidup, dan ciri-ciri fisik yang sama. Masing-masing mereka mengidentifikasikan diri antara satu dengan yang lain.

Menurut Fredrick Barth. dikutip (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2243203-pengertian-etnis-suku-ras-dan/>) suku adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya sedangkan Hassan Shadily MA. Suku adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis

Menurut Ensiklopedi Indonesia suku bangsa berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat-istiadat dan tradisi. Dikutip dari (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2243203-pengertian-etnis-suku-ras-dan/>)

2. Agama

Mengenai agama perlu dijelaskan lebih dulu beberapa hal.

Muhamad Daut Ali (2008:35) menyatakan:

perkataan agama berasal dari bahasa sangsekera yang erat hubungannya dengan Hindu dan Budha. Dalam kepustakaan dapat dijumpai uraian perkataan ini. Akar kata agama adalah *gam* yang mendapat awalan *a* dan akhiran *a* sehingga menjadi menjadi *a-gam-a*, kadang-kadang mendapat awalan *i* dengan akhiran yang sama, sehingga menjadi *i-gam-a*, kadang kala mendapat awalan *u* dengan akhiran yang sama sehingga menjadi *u-gam-a*. Dalam hubungan dengan makna perkataan diatas (*agama*, *igama*, dan *ugama*) dalam bahasa bali mempunyai makna berikut. *Agama* artinya peraturan, tatacara, upacara hubungan dengan raja, *igama* artinya peraturan, tatacara, upacara dalam berhubungan dengan dewa-dewa, sedangkan *ugama* ialah peraturan, tatacara dalam berhubungan antar manusia. Ketiga kata itu kini dipakai dalam tiga bahasa: *agama* dalam bahasa Indonesia, *ugama* dalam bahasa malaysia, dan *igama* dalam bahasa Jawa.

Muhamad Daut Ali (2008:35) mengemukakan pengertian Agama yang berarti: “agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan, dan permohonan dan membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama itu”

Menurut D. Hendropuspito , OC (2006 :34) agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.

Thomas F.O. Dea dalam D. Hendropuspito, O,C (2006:34) “menyatakan melalui definisi yang banyak dipakai dalam teori-teori fungsional bahwa “agama ialah pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris untuk maksud non-empiris” sedangkan menurut J. Milton Yinger dalam D. Hendropuspito O, C (2006 :106) melihat agama dari sistem kepercayaan dan praktek dengan mana suatu masyarakat atau kelompok manusia berjaga-jaga untuk menghadapi masalah terakhir dalam hidup ini, sebagai sarana penyesuaian diri (*coping*) agama dapat memberikan hasil baik yang positif maupun

negatif pada individu. Hasil positif antara lain sebagai berikut;

- a. Secara psikologik memberi makna hidup, memperjelas tujuan hidup, dan memberikan perasaan bahagia karena hidup ini lebih berarti
- b. Secara sosiologik menjadi lebih intim, dekat, dan akrab dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat dan karenanya timbul terlindungi dan saling memiliki
- c. Menemukan identitas diri, menemukan kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan diri dalam usahanya untuk mencapai Tuhan. Sebaliknya, hasil yang negatif adalah depresi, kehilangan kepercayaan diri, agresif, atau mengembangkah halusinasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang sesuai dengan aturan-aturan agama tersebut yang dipercaya akan menyelamatkan umatnya di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang

3. Ras

Menurut Gill dan Gilbert dalam Liliweri Alo (2005:19) “ras merupakan pengertian biologis yang menjelaskan sekumpulan orang yang dapat dibedakan menurut karakteristik fisik yang menghasilkan proses reproduksi”. Sedangkan menurut Horton dan Hunt dalam Janu Murdiyatmoko (2007:6) “ras adalah suatu kelompok manusia yang sedikit berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya dalam segi ciri-ciri fisik bawaan. Disamping itu banyak banyak juga ditentukan oleh pengertian yang digunakan di masyarakat”.

Menurut Kottak dalam Liliweri Alo (2005:19) “pengertian ras dapat ditinjau dari dua segi yaitu sebagai konstruksi sosial (*social construction*) dan konstruksi biologis (*biological construction*)” sedangkan menurut Stephen K. Senderson Janu Murdiyatmoko (2007:6) “ras adalah suatu kelompok kategori orang-orang yang mengidentifikasikan diri mereka sendiri, dan diidentifikasi oleh orang-orang lain, sebagai perbedaan sosial yang dilandasi dengan ciri-ciri fisik atau biologis”.

Dari pengertian menurut beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa ras adalah kategori individu yang secara turun menurun memiliki ciri-ciri fisik dan biologis tertentu. Persamaan umum dalam ras yaitu ras merupakan biologis tertentu.

4. Golongan/Kelas Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2009:207) “Kelas sosial adalah semua orang dari keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui oleh masyarakat umum”. Menurut Kurt. B. Mayer dalam Soejono Soekanto (2009:207) “istilah kelas hanya digunakan untuk lapisan yang bersandarkan pada unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan dinamakan kelompok kedudukan (*status grup*)”.

Menurut Soerjono Soekanto (2009:28) Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk mengolong-golongkan anggota masyarakat kedalam lapisan-lapisan masyarakat adalah:

1. Ukuran Kekayaan
2. Ukuran Kekuasaan
3. Ukuran Kehormatan
4. Ukuran Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis jelaskan bahwa ukuran atau kelas sosial individu yang tau akan keberadaannya dan keadaanya dalam suatu kumpulan masyarakat sehingga kelas sosial dapat diukur dan dilihat dari kekayaan yang berarti orang yang paling kaya masuk lapisan atas, ukuran kekuasaan yang berarti memiliki kekuasaan atau wilayahnya memiliki , ukuran kehormatan yang berai orang yang disegani atau dihormati dan berjasa, dan ukuran ilmu yang berarti masyarakat yang menghargai ilmu.

B. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie (2009:56) mendefinisikan penegakan hukum, yaitu “proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara” sedangkan menurut Sri Pudyatmoko (2009:112) menyatakan bahwa:

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, atau, tindakan dengan mengorganisasikan berbagai instrument untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Sekaligus dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan upaya yang terpisahkan dari proses hukum itu sendiri.

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka (1977:89), menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai:

Kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Liliana Tedjosaputro (2003:66), menyatakan bahwa:

Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.

Dapat penulis simpulkan dari penjelasan di atas bahwa penegakan hukum adalah suatu cara atau alat yang digunakan oleh pemerintahan dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Peranan Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto (2009;243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Menurut Aim Abdulkarim (2008: 26) Pengertian pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu:

Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuan negara.

Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara.

Dapat penulis jelaskan dari pendapat di atas bahwa peranan pemerintah adalah kontribusi pemerintah demi masyarakatnya untuk mengatur dan menata pemerintahan dalam sistem yang sesuai dengan undang-undang dan etika yang berlaku di suatu negara.

D. Kesenjangan ekonomi

Menurut Hendra Kuswadi dikutip di: [http://hendrakuwandi.blogspot.com/2012 /03/kesenjangan-ekonomi-di-indonesia.html](http://hendrakuwandi.blogspot.com/2012/03/kesenjangan-ekonomi-di-indonesia.html)
Kesenjangan ekonomi adalah “terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan 2 masalah besar di negara-negara berkembang”. Negara Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang disebut dengan *trickle down effects* yaitu bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat, namun pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat.

Faktor penyebab kesenjangan ekonomi :

1. Menurunnya pendapatan per kapita.
2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
3. Rendahnya mobilitas sosial.
4. Pencemaran Lingkungan Alam

Dampak kesenjangan ekonomi:

1. Kekerasan
2. Kesehatan maupun Kesejahteraan

Upaya penanggulangan kesenjangan ekonomi :

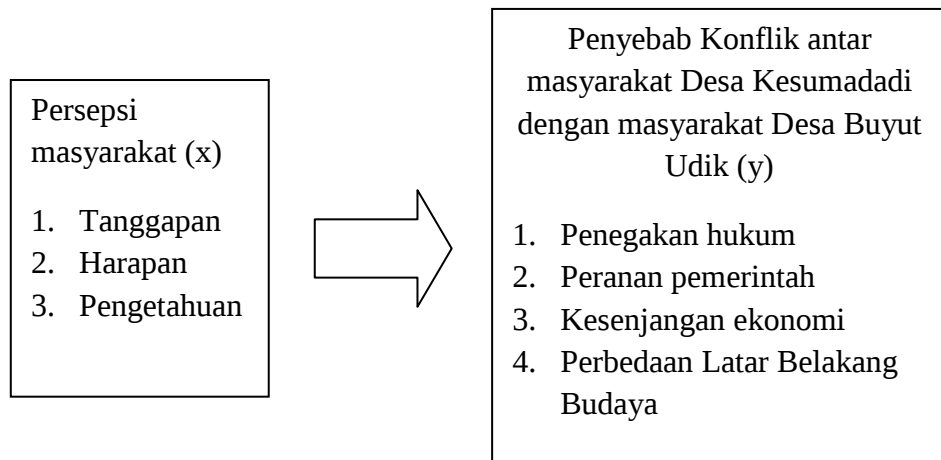
1. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin.
2. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin
3. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin

Dapat penulis jelaskan dari pernyataan di atas bahwa kesenjangan ekonomi pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di masyarakat sehingga menghasilkan hal positif seperti suatu kesehatan, kesejahteraan, dan dapat pula menghasilkan hal negative seperti kekerasan atau konflik.

2.2 Kerangka Pikir

Persepsi bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berfikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi pada setiap individu. Taraf terakhir dari proses persepsi adalah individu menyadari apa yang diterima melalui alat indera.

Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri dan ini dapat menyebabkan perbedaan anggapan dan kesalah pahamanan pada suatu objek atau suatu peristiwa yang sedang terjadi dan ada kemungkinan bahwa individu hanya mengetahui sedikit tentang objek atau peristiwa tersebut. Dengan demikian. Untuk mengetahui gambaran bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyebab konflik antara masyarakat Desa Kesumadadi dengan masyarakat Desa Buyut Udik di Dusun Sidorejo 1 Desa Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir